

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peneliti Terdahulu

1. Ira Dewi Haryani (2024), Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram dalam penelitian yang berjudul “ **Implementasi Program Permakanan Bagi Lanjut Usia Keluarga Tunggal Dalam Kondisi Miskin di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat** ”. Penelitian ini dilatar belakangi Program pemberian Permakanan bagi Lanjut Usia adalah salah satu program pemerintah melalui Kementerian Sosial RI untuk kesejahteraan sosial lanjut usia khususnya lanjut usia keluarga tunggal yang berada dalam kondisi miskin. Implementasi program permakanan ini adalah di tingkat Provinsi sampai Kabupaten yang disalurkan melalui Dinas Sosial di masing-masing Kabupaten tidak terkecuali Kabupaten Lombok Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi program pemberian permakanan lanjut usia terlantar yang berada dalam kondisi miskin. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari, kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat beserta staf, pendamping sosial, ketua kelompok masyarakat (Pokmas), lanjut usia penerima manfaat program, serta pihak pendistribusi makanan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini terlaksanan dengan baik, tepat sasaran dan di nilai dapat memberikan perlindungan serta pemeliharaan kesejahteraan bagi lanjut usia. Kesimpulan implementasi program permakanan lanjut usia berjalan sesuai dengan petunjuk teknis program dengan merujuk pada teori komunikasi,

sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi, dengan biaya pendistribusian makanan yang sangat minim yakni Rp2.000,- (dua ribu rupiah) untuk dua kali makan per hari/orang dalam satu kali pengantaran. Menjadi tidak efektif apabila disamakan antara pokmas yang jangkauan cukup dekat jika dibandingkan dengan pokmas yang jaraknya lumayan jauh dari lokasi masing-masing pokmas.

2. Hana Nida Hanifah (2024), Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, Indonesia dalam penelitian yang berjudul “ **Pengelolaan Program Bantuan Permakanan Bagi Lanjut Usia Keluarga Tunggal di Desa Bojongkoneng Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat** “. Penelitian ini dilator belakangi Lanjut usia keluarga tunggal merupakan kelompok rentan yang menghadapi keterbatasan fisik, ekonomi, dan sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pangan bergizi. Program permakanan yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial melalui pendekatan berbasis masyarakat menjadi salah satu solusi strategis untuk meningkatkan kesejahteraan lansia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan program permakanan bagi lansia keluarga tunggal di Desa Bojongkoneng Kecamatan Ngamprah berdasarkan empat fungsi manajemen George R. Terry, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap delapan informan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah dilaksanakan secara sistematis namun belum optimal dan belum terstandarisasi di semua aspek manajemen. Permasalahan utama terletak pada ketiadaan asesmen individual, ketidakjelasan standar rekrutmen Pokmas,

ketiadaan SOP teknis dan K3, serta lemahnya sistem monitoring dan evaluasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya asesmen kebutuhan lansia, penyusunan SOP, serta penguatan kelembagaan Pokmas dan sistem pengawasan berbasis.

B. Tinjauan Teoritis

1. Administrasi

a. Pengertian Administrasi

Administrasi Publik adalah suatu bidang yang mempelajari dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah serta berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik untuk mengelola layanan kepada masyarakat. Sebagai disiplin ilmu, Administrasi Publik berfungsi untuk menjembatani Antara keputusan politik yang diambil oleh pemerintah dan pelaksanaannya dalam bentuk layanan dan program yang nyata bagi masyarakat. Menurut Nicholas Henry (dalam Gede Wirata, 2024:1) Administrasi Publik didefinisikan sebagai semua aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah, baik pada level pusat maupun daerah. Definisi ini menekankan pentingnya peran Administrasi Publik sebagai alat untuk menerjemahkan kebijakan menjadi aksi nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya Administrasi Publik yang efektif, kebijakan pemerintah tidak akan mencapai tujuan yang diinginkan.

Administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Sondang Paian Siagian

(dalam Isnaini Rodiyah, 2025:2). (Abdul Nadjib, 2024:1) Administrasi merupakan elemen penting dalam setiap organisasi, baik itu di sektor publik maupun swasta, karena melibatkan pengelolaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses administrasi tidak hanya terbatas pada pengelolaan dokumen dan tugas-tugas kantor, tetapi mencakup berbagai aspek manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian kegiatan operasional. Dalam konteks ini, administrasi berperan sebagai kerangka kerja yang memastikan agar semua elemen organisasi berfungsi secara harmonis dan efisien. Pemahaman terhadap konsep administrasi sangat penting untuk memastikan bahwa organisasi mampu beradaptasi dengan tantangan, mengambil keputusan yang tepat, serta mencapai hasil yang optimal.

1) Perencanaan (Planning)

Perencanaan (Planning) merupakan salah satu konsep dasar dalam administrasi yang bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan tertentu. Perencanaan tidak hanya melibatkan identifikasi tujuan, tetapi juga menyusun kebijakan dan prosedur yang relevan agar tercapai secara efisien. Selain itu, proses ini juga mencakup alokasi sumber daya yang tepat dan pengaturan waktu yang sesuai untuk mencapai hasil yang optimal. Menurut Robbins dan Coulter (2018), perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, merumuskan strategi, dan mengembangkan rencana aksi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Fungsi perencanaan dalam administrasi tidak hanya berfokus pada tujuan jangka pendek, tetapi juga

penting untuk pengembangan jangka panjang. Dalam implementasinya, perencanaan harus fleksibel agar dapat menyesuaikan dengan perubahan lingkungan dan kondisi yang tidak terduga. Administrasi yang efektif membutuhkan perencanaan yang terstruktur dan berkelanjutan sehingga risiko-risiko dapat diminimalisasi. Oleh karena itu, perencanaan dianggap sebagai landasan yang memengaruhi semua aspek manajemen organisasi. Selain itu, perencanaan juga berperan dalam mengoordinasikan berbagai bagian dari organisasi sehingga seluruh elemen bekerja menuju tujuan yang sama. Perencanaan yang baik menciptakan keteraturan dalam pelaksanaan tugas dan mencegah adanya konflik di dalam organisasi. Tanpa perencanaan yang jelas, organisasi dapat kehilangan arah dalam menjalankan operasionalnya. Oleh karena itu, manajer harus mampu membuat rencana yang realistis dan dapat diterapkan secara efektif.

2) Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian (Organizing) adalah konsep kunci dalam administrasi yang melibatkan pengaturan sumber daya dan aktivitas secara sistematis untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam proses ini, struktur organisasi dibentuk untuk mengoordinasikan berbagai fungsi dan tugas yang ada. Pengorganisasian juga melibatkan pembagian tugas dan tanggung jawab di antara anggota organisasi, sehingga setiap individu tahu perannya dalam mencapai tujuan bersama. Menurut Daft (2018), pengorganisasian mencakup penyusunan hubungan kerja yang efektif antara sumber daya manusia, teknologi, dan informasi untuk

memastikan bahwa organisasi berfungsi secara efisien.

Proses pengorganisasian membantu menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan pembagian tugas yang jelas dan terarah. Struktur organisasi yang baik memastikan adanya koordinasi yang optimal Antara berbagai departemen dan fungsi dalam suatu perusahaan. Selain itu, pengorganisasian juga memungkinkan adanya delegasi wewenang yang tepat, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien. Dengan demikian, pengorganisasian tidak hanya bertujuan untuk mencapai efisiensi internal, tetapi juga memastikan bahwa organisasi mampu beradaptasi dengan perubahan eksternal. Pengorganisasian yang efektif juga membantu mengelola konflik dan meningkatkan komunikasi di dalam organisasi. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, risiko tumpang tindih peran dan tanggung jawab dapat diminimalisasi. Pengorganisasian yang baik menciptakan aliran informasi yang terstruktur, yang mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Selain itu, hubungan antaranggota organisasi menjadi lebih harmonis karena setiap orang memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang diharapkan darinya.

3) Pengarahan (Directing)

Pengarahan (Directing) merupakan salah satu fungsi penting dalam administrasi yang berkaitan dengan upaya memotivasi, membimbing, dan mengarahkan anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam proses ini, pemimpin memberikan instruksi dan memastikan bahwa setiap individu bekerja sesuai dengan rencana yang

telah ditentukan. Pengarahan juga mencakup pengawasan dan pemecahan masalah ketika hambatan muncul dalam pelaksanaan tugas. Menurut Jones dan George (2020), pengarahannya adalah proses memimpin, memotivasi, dan menginspirasi anggota organisasi agar bekerja dengan penuh semangat menuju pencapaian tujuan organisasi.

4) Pengendalian (Controlling)

Pengendalian (Controlling) adalah salah satu fungsi manajemen yang penting dalam administrasi, yang berfokus pada pemantauan dan evaluasi kinerja organisasi untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Proses ini melibatkan penetapan standar kinerja, pengukuran hasil aktual, dan membandingkan keduanya untuk mengidentifikasi adanya deviasi. Ketika penyimpangan dari rencana terdeteksi, langkah-langkah perbaikan dapat diambil untuk mengembalikan kinerja ke jalur yang benar. Menurut Bateman dan Snell (2021), pengendalian adalah proses penetapan standar, pengukuran kinerja, dan pengambilan tindakan korektif untuk mencapai tujuan organisasi.

b. Fungsi Administrasi

Berdasarkan pengertian administrasi menurut para ahli pengertian tersebut dapat disimpulkan jika pekerjaan ini memiliki fungsi atau peran yang sangat penting (Siti Marwiyah.2022:2). Berikut ini adalah beberapa fungsi administrasi yang harus anda ketahui:

1) Planing

Berdasarkan salah satu pengertian administrasi perkantoran menurut para

ahli menyebutkan jika administrasi adalah sebuah kegiatan perencanaan. Maka, fungsi administrasi yang pertama adalah fungsi planning atau perencanaan dimana dalam perencanaan ini dibutuhkan pengumpulan dan pengolahan data kemudian menyusun perencanaan.

2) Organizing

Fungsi selanjutnya yang juga menjadi pengertian administrasi perkantoran menurut para ahli adalah fungsi organizing atau pengorganisasian. Fungsi ini adalah menyusun serta membentuk hubungan kerja antara satu pihak dengan pihak lain hingga terwujud kesatuan.

3) Reporting

Fungsi lain dari administrasi ini adalah reporting dimana kegiatan yang dilakukan adalah melaporkan perkembangan dan hasil kegiatan melalui keterangan, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dengan adanya fungsi ini, pihak yang menerima laporan kegiatan bisa mengetahui dan mendapatkan gambaran informasi atas pelaksanaan tugas yang sudah dikerjakan.

4) Budgeting

Fungsi terakhir ini sebenarnya bisa masuk dalam ranah administrasi namun dalam bidang keuangan. Dimana jika dilihat berdasarkan fungsi administrasi keuangan ini adalah untuk mengelola atau mengatur segala perencanaan tentang anggaran atau keuangan yang digunakan. Pada dasarnya, pengetahuan administrasi keuangan ini hampir sama dengan administrasi perkantoran, namun lebih spesifik dalam fungsi mengatur keuangan.

2. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan bentuk rangkaian kegiatan yang berupa aktivitas atau membuat tentang keputusan rencana program oleh pihak pemerintah tersebut. Sedangkan menurut Fredrich dalam Agustino, (2017:166) “kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan dan kesempatan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”. Pengertian kebijakan publik yang diberikan oleh Thomas R. Dye dalam Ayuningtyas (2014:8) yang mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (whatever governments choose to do or not todo)”. Sementara itu, Anderson dalam Agustino (2017:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok actor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan. Menurut Abdul Wahab (2005), kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian yang harus dilaksanakan atau tidak, itu sudah menjadi keputusan pemerintah yang diikuti oleh seseorang atau sekelompok actor. Berkaitan dengan suatu permasalahan yang diperhatikan oleh pemerintah,

kebijakan publik memberikan suatu tindakan sanksi yang mengarah pada suatu permasalahan yang telah menjadi perhatian penuh pemerintah.

b. Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Ciri-ciri kebijakan publik menurut Suharno.2010 (dalam Siti Marwiyah.2022:13), antara lain:

- 1) Kebijakan publik adalah tindakan yang mengarah pada tujuan sebagai perilaku atau yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
- 2) Kebijakan pada hakekatnya terdiri dari tindakan yang saling berkaitan dengan pola yang mengarah pada tujuan tertentu dan dilakukan oleh pejabat pemerintah dan keputusan yang berdiri sendiri.
- 3) Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang, melainkan diikuti dengan keputusan yang ada sangkut pautnya dengan implementasi dalam pemaksaan pemberlakuan.
- 4) Kebijakan ada sangkut pautnya dengan apa yang menjadi pernyataan yang benar dilakukan oleh pemerintah dengan bidang tertentu.
- 5) Kebijakan publik berbentuk positif maupun negatif, karena meliputi keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau melakukan yang akan menjadi masalah dengan itu pemerintah harus mengikuti/campur tangan dengan apa yang sudah terjadi/masalah yang ada.

c. Jenis Kebijakan Publik

Menurut James Anderson yang dikutip Suharno (Dalam Siti Marwiyah,2022:13) menyampaikan bahwa katagori kebijakan public sebagai

berikut:

- 1) Kebijakan substantif dan kebijakan procedural Kebijakan substantif merupakan kebijakan yang menyangkut dengan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah tersebut. Sedangkan kebijakan prosedural merupakan bagaimana kebijakan dijalankan.
- 2) Kebijakan distributive, kebijakan regulatori dan kebijakan redistributive Kebijakan distributif merupakan distribusi pelayanan atau pemanfaatan kepada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi 14 kekayaan, pendapatan, kepemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.
- 3) Kebijakan material dan kebijakan simbolik Kebijakan material merupakan kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya secara detail pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolis merupakan kebijakan yang memberikan manfaat kepada kelompok sasaran.
- 4) Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum dan barang privat Kebijakan barang umum merupakan kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan kebijakan barang privat merupakan kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

d. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William N. Dunn (Dalam Siti Marwiyah, 2022:14) adalah sebagai berikut:

1) Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda merupakan sebuah proses yang sangat strategis dalam realitas dalam mengatur kebijakan publik. Dalam proses inilah ada didalam ruang untuk melaksanakan apa yang menjadi kebutuhan. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan sering disebut juga sebagai masalah kebijakan publik, biasanya muncul karena telah terjadi saling berpendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang sudah selesai atau akan ditempuh mengenai karakter permasalahan tersebut.

2) Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan merupakan masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan, setelah itu masalah didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat di pilih sebagai kebijakan yang di ambil untuk memecahkan masalah.

3) Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi ialah memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat di atur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang

sudah direncanakan harus didukung. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi symbol itu namun dimana melalui proses bagi warga negara belajar untuk mendukung pemerintah.

4) Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia.

5) Evaluasi Kebijakan/Penilaian

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi di pandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

3. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Secara etimologis kata implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*to implement*”. Yang artinya menyediakan sarana bagi pelaksana sesuatu dan “*to partical effect* “ yang artinya untuk menimbulkan efek atau dampak. Sesuatu yang di laksanakan untuk menimbulkan efek atau dampak itu dapat berupa peraturan undang – undang (Marwiyah, 2022:36). Implemtasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia mengandung arti pelaksanaan,

penerapan, (pertemuan kedua arti tersebut bermaksud mencari bentuk). Sedangkan menurut Kusnandar di dalam tulisannya mengartikan implemtasi adalah sebagai penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, ketrampilan maupun nilai dan sikap.

Implementasi Kebijakan Publik Merupakan salah satu dimensi dalam proses kebijakan publik, yang juga sangat menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan serta dapat diterima oleh publik (Kadji,2015:45).

Kebijakan publik merupakan bentuk rangkaian kegiatan yang berupa aktivitas atau membuat tentang keputusan rencana program oleh pihak pemerintah tersebut (Marwiyah,2022:12)

Implementasi ini merupakan suatu penerapan atau juga sebuah tindakan yang dilakukan dengan berdasarkan suatu rencana yang telah atau sudah disusun atau dibuat dengan cermat serta juga terperinci sebelumnya. Pendapat lain juga mengatakan bahwa pengertian implementasi merupakan suatu tindakan atau juga bentuk aksi nyata dalam melaksanakan rencana yang sudah dirancang dengan matang. Dengan kata lain, implementasi ini hanya dapat dilakukan apabila sudah terdapat perencanaan. Dari penjelasan itu kita dapat melihat bahwa implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem, jadi penerapan implementasi itu harus sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat supaya hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Sesuatu yang di laksanakan untuk menimbulkan efek atau dampak itu berupa peraturan undang – undang, keputusan dan kabijakan yang dibuat oleh

lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Sedangkan implementasi kebijakan merupakan langkah lanjutan berdasarkan suatu kebijakan formulasi. Definisi yang umum di pakai menyangkut kebijakan implementasi, implementasi adalah tindakan - tindakan yang dilakukan baik oleh individu – individu, pejabat – pejabat, atau kelompok – kelompok pemerintah atau swasta yang di arahkan pada tujuan – tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Sedangkan menurut George C. Edwards, Implementasi Kebijakan Publik ada 4 variabel, yaitu (Subianto,2020:70) :

1) Komunikasi

Komunikasi sangat penting, karena suatu program hanya dapat diimplementasikan dengan baik, jika jelas bagi pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi atau transmisi, kejelasan informasi (clarity) serta konsentrasi informasi yang disampaikan.

2) *Resources* (Sumber Daya)

Resources (Sumber Daya) Mencakup empat komponen yakni, Staff yang cukup (kuantitas & kualitas); informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan; *Authority* (kewenangan) guna melaksanakan tugas dan tanggung-jawab serta fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

3) *Disposisi* (Sikap Pelaksana)

Adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap program, khususnya dari mereka yang menjadi implementor, dalam hal ini terutama adalah aparatur birokrasi.

4) Struktur Birokrasi

Yaitu terdapatnya suatu SOP (*Standard Operating Procedures*), tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan program. Jika hal ini tidak ada, maka sulit untuk mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian masalah bersifat ad-hoc, memerlukan penanganan dan penyelesaian khusus tanpa pola yang standar. Fragmentasi yang sering terdapat di dalam organisasi harus dihindari dan diatasi melalui sistem koordinasi.

Dari pengertian menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan suatu bentuk tindakan yang akan berupa dengan keputusan yang telah diterapkan untuk menyelesaikan suatu masalah yang akan lebih menjamin disuatu hari nanti.

b. Tujuan Implementasi

Dalam rangka memastikan kebijakan publik dapat dilaksanakan secara efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, implementasi ini merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis serta terikat oleh mekanisme untuk dapat mencapai tujuan tertentu implementasi kebijakan publik, maka beberapa tujuan pelaksana adalah:

- 1) Bertujuan untuk merealisasikan kebijakan yang telah ditetapkan agar dapat dilaksanakan secara konkret dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
- 2) Bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan, sasaran, dan target kebijakan dapat tercapai sesuai dengan ketentuan yang telah dirumuskan oleh pembuat kebijakan.

- 3) Bertujuan untuk mengatasi permasalahan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat
- 4) Bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia agar kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- 5) Bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- 6) Bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat agar lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok sasaran.
- 7) Bertujuan untuk mengetahui hambatan dan keberhasilan pelaksanaan kebijakan sebagai dasar evaluasi dan penyempurnaan kebijakan di masa mendatang.

Tujuan implementasi kebijakan pada dasarnya adalah memastikan bahwa kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga berwenang benar-benar dapat dilaksanakan secara nyata dan memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Kebijakan tidak hanya berhenti sebagai dokumen hukum atau keputusan administratif, tetapi diterjemahkan ke dalam tindakan konkret yang menyentuh kehidupan masyarakat. Melalui implementasi, arah, visi, dan tujuan kebijakan diwujudkan dalam program, kegiatan, serta pelayanan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh kelompok sasaran.

Jika dikaitkan dengan judul “Implementasi Program Permakanan bagi Lanjut Usia Keluarga Tunggal terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Lansia dan Keberfungsian Sosial Lansia khususnya Lansia Terlantar oleh Kelompok

Masyarakat (Pokmas) di Kecamatan Kelua”, maka tujuan implementasi kebijakan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tujuan implementasi Program Permakanan bagi lanjut usia keluarga tunggal adalah untuk memastikan bahwa kebijakan dan program bantuan sosial yang ditetapkan oleh pemerintah benar-benar terlaksana secara efektif di tingkat lokal, khususnya di Kecamatan Kelua. Program ini bertujuan memenuhi kebutuhan dasar lansia terlantar, terutama kebutuhan pangan yang layak dan bergizi, sehingga dapat menunjang kesehatan fisik dan ketahanan tubuh lansia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pemenuhan kebutuhan dasar tersebut menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas hidup lansia yang hidup sendiri dan berada dalam kondisi rentan secara sosial maupun ekonomi.

Selain pemenuhan kebutuhan pangan, implementasi program ini juga bertujuan meningkatkan kualitas hidup lansia secara menyeluruh. Melalui pelaksanaan program permakanan yang berkelanjutan, lansia diharapkan dapat hidup lebih sehat, merasa diperhatikan, dan memiliki rasa aman dalam menjalani masa tua. Rasa kepedulian yang ditunjukkan melalui program ini dapat mengurangi perasaan kesepian, keterasingan, dan ketidakberdayaan yang sering dialami oleh lansia keluarga tunggal dan lansia terlantar.

c. Fungsi Implementasi Kebijakan

Fungsi Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kebijakan, karena pada tahap inilah kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh pemerintah diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata. Tanpa adanya implementasi yang

baik, kebijakan publik hanya akan berhenti pada tataran dokumen dan tidak memberikan dampak yang berarti bagi masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan program sangat ditentukan oleh efektivitas implementasinya, yang dapat dianalisis melalui empat variabel Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel ini menjadi dasar untuk memahami fungsi implementasi program secara menyeluruh.

1) Komunikasi

Fungsi implementasi dari aspek komunikasi adalah memastikan informasi mengenai program permakanan tersampaikan secara jelas kepada semua pihak, termasuk pemerintah, Pokmas sebagai pelaksana, dan lansia penerima manfaat. Komunikasi yang efektif berfungsi untuk memberikan pemahaman yang sama mengenai tujuan, prosedur, mekanisme pendistribusian makanan, serta hak dan kewajiban lansia. Fungsi ini juga membantu mengurangi miskomunikasi dan meningkatkan partisipasi serta kesadaran lansia dalam menerima bantuan, sehingga program dapat berjalan sesuai rencana.

2) Sumber Daya

Fungsi implementasi dari aspek sumber daya adalah memastikan tersedianya sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program. Pokmas sebagai pelaksana program membutuhkan dukungan sumber daya yang cukup agar distribusi makanan dapat dilakukan secara tepat waktu, merata, dan berkelanjutan. Fungsi ini juga mencakup pengelolaan sumber

daya secara optimal agar program dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup lansia.

3) Disposisi

Fungsi implementasi dari aspek disposisi adalah mendorong sikap dan komitmen positif pelaksana, dalam hal ini Pokmas, agar menjalankan program dengan penuh tanggung jawab, peduli, dan profesional. Disposisi yang baik berfungsi untuk memastikan bahwa bantuan permakanan tidak hanya disalurkan secara administratif, tetapi juga dilandasi empati sosial sehingga keberfungsian sosial lansia, seperti keterlibatan sosial dan rasa dihargai, dapat ditingkatkan.

4) Struktur Birokrasi

Fungsi implementasi dari aspek struktur birokrasi adalah menciptakan mekanisme kerja yang jelas, terkoordinasi, dan sesuai prosedur antara pemerintah, Pokmas, dan pihak terkait. Struktur birokrasi yang efektif berfungsi untuk memperlancar perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan program permakanan. Fungsi ini memastikan pelaksanaan program berjalan tertib, akuntabel, dan selaras dengan tujuan kebijakan perlindungan lansia.

Fungsi implementasi kebijakan publik memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Melalui pelaksanaan kebijakan yang terencana, terkoordinasi, dan berorientasi pada tujuan, kebijakan publik diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta menjawab permasalahan publik yang menjadi latar belakang perumusannya.

Dengan demikian, implementasi kebijakan tidak hanya dipahami sebagai proses administratif semata, tetapi sebagai upaya nyata untuk mewujudkan tujuan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

d. Model Implementasi Kebijakan Publik

Model yang digunakan oleh George C. Edward III dimana ada 4 variabel yaitu :

- 1) Variabel Komunikasi, Variabel komunikasi menekankan pentingnya penyampaian informasi yang jelas dan konsisten dari pembuat kebijakan kepada pelaksana. menekankan bahwa komunikasi yang efektif tidak hanya mencakup penyebaran dokumen atau instruksi formal, tetapi juga pemahaman yang mendalam oleh pelaksana tentang tujuan, sasaran, prosedur, serta peran mereka dalam pelaksanaan kebijakan. Tanpa komunikasi yang memadai, pelaksana dapat salah menafsirkan maksud kebijakan, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas implementasi. Komunikasi yang baik juga memungkinkan adanya umpan balik dari pelaksana kepada pembuat kebijakan, sehingga setiap hambatan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan dapat segera diperbaiki. Dengan demikian, komunikasi menjadi jembatan penting antara perumusan kebijakan dan pelaksanaan nyata di lapangan.
- 2) Variabel Sumber Daya, Sumber daya merupakan variabel yang menunjukkan sejauh mana pelaksana memiliki akses terhadap segala bentuk dukungan yang dibutuhkan untuk menjalankan kebijakan.

menekankan bahwa ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya, baik itu tenaga manusia yang kompeten, anggaran yang cukup, sarana dan prasarana pendukung, maupun waktu yang memadai, menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan implementasi. Tanpa sumber daya yang memadai, pelaksana akan mengalami kesulitan dalam menerapkan kebijakan sesuai rencana, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat gagal tercapai. Selain itu, Edward III menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya secara efisien dan efektif, karena sumber daya yang terbatas harus dimaksimalkan untuk menghasilkan dampak yang optimal bagi penerima manfaat.

- 3) Variabel Disposisi, Disposisi pelaksana adalah variabel yang berkaitan dengan sikap, motivasi, dan komitmen pelaksana terhadap kebijakan yang mereka jalankan., keberhasilan implementasi sangat bergantung pada apakah pelaksana memiliki disposisi yang positif, yang ditandai dengan kesediaan untuk bekerja secara proaktif, bertanggung jawab, dan peduli terhadap tujuan kebijakan. Sebaliknya, jika pelaksana menunjukkan disposisi negatif, seperti ketidakpedulian, resistensi, atau kurangnya motivasi, hal ini dapat menjadi penghambat signifikan dalam proses implementasi. Disposisi yang baik tidak hanya memengaruhi kinerja individu pelaksana, tetapi juga memengaruhi interaksi mereka dengan penerima manfaat dan pihak lain yang terlibat, sehingga berdampak pada keberhasilan keseluruhan pelaksanaan kebijakan.
- 4) Variabel Struktur Birokrasi, Struktur birokrasi merupakan variabel yang mencakup aturan, prosedur, mekanisme kerja, dan hierarki organisasi

yang mengatur pelaksanaan kebijakan. Edward III menekankan bahwa struktur birokrasi yang jelas dan terkoordinasi mempermudah pelaksana untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka. Struktur birokrasi yang efektif memungkinkan adanya koordinasi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat, memperjelas alur pelaksanaan, dan meminimalkan tumpang tindih tugas. Sebaliknya, struktur birokrasi yang rumit, tumpang tindih, atau tidak fleksibel dapat menjadi penghambat yang signifikan.

1. Lanjut Usia (Lansia)

a. Pengertian Lanjut Usia

Lanjut usia atau lansia adalah fase kehidupan yang ditandai oleh penurunan fungsi fisik, psikologis, dan sosial seseorang akibat proses penuaan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, lanjut usia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas tetapi program ini harus di atas umur 70 tahun ke atas.

Selain aspek biologis, lansia juga menghadapi perubahan psikologis, seperti meningkatnya risiko depresi, kesepian, atau ketergantungan pada orang lain. Perubahan sosial pun terjadi, terutama bagi lansia yang hidup sendiri atau dalam keluarga tunggal, karena mereka cenderung kehilangan interaksi sosial yang rutin, dukungan keluarga, dan akses terhadap layanan sosial. Kondisi ini membuat lansia kelompok ini

lebih rentan terhadap keterlantaran, kurangnya pemenuhan kebutuhan dasar, serta berkurangnya keberfungsian sosial.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, 2015) menyebut lansia sebagai individu yang memasuki tahap akhir kehidupan produktif, yang memerlukan perhatian khusus dalam pemenuhan hak-haknya, termasuk kesehatan, gizi, perlindungan sosial, dan partisipasi dalam kegiatan sosial. Lansia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya secara fisik dan sosial memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan dapat terus berperan dalam masyarakat. Oleh karena itu, berbagai program sosial, seperti Program Permakanan bagi Lansia Keluarga Tunggal, menjadi strategi penting untuk meningkatkan kesejahteraan fisik, psikologis, dan sosial lansia, terutama bagi mereka yang kurang mendapat dukungan keluarga atau masyarakat.

b. Program Permakanan Lanjut Usia

Permakanan adalah sebuah kegiatan untuk memberikan makanan yang terdiri dari nasi/sejenisnya, lauk pauk, sayur, buah, dan air mineral yang diberikan sebanyak 2 (dua) kali sehari dalam 1 (satu) kali pengantaran. Penerima pemanfaat adalah Lanjut Usia yang telah terdaftar dalam DTKS, sasaran penerima program untuk lanjut usia dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Miskin atau tidak mampu
- 2) Berusia 70 tahun keatas
- 3) Terdaftar dalam DTKS

- 4) Bukan berstatus sebagai pensiunan /istri/suami pegawai negeri sipil dan purnawirawan tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia
- 5) Terdaftar seorang diri didalam kartu keluarga
- 6) Memiliki nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (KK).
- 7) Di rekomendasikan oleh camat/kepala dinas sosial setempat sebagai calon penerima manfaat.

c. Kelompok Masyarakat (Pokmas)

Kelompok Masyarakat (Pokmas) merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam konteks Program Permakanaan bagi Lanjut Usia, Pokmas berperan sebagai pelaksana kegiatan yang meliputi pendataan lansia, pengelolaan distribusi makanan, serta pendampingan lansia.

Berdasarkan teori partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam program sosial dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program. Pokmas menjadi jembatan antara pemerintah dan lansia dalam memastikan program permakanaan berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur logika yang menghubungkan teori, fakta, dan penelitian, pemikiran seseorang yang sedang di pahami agar dijadikan acuan dalam memecahkan masalah yang sedang di teliti, sesuai dengan teori yang di kemukakan menurut Teori George C. Edwards III, (Subianto , 2020:70) tentang implementasi kebijakan di pengaruhi oleh empat variabel :

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi, dan
4. Struktur birokrasi.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diajukan kerangka pemikiran sebagai berikut .



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

